



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan

Jl Bangun Praja Banjarbaru

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas izin dan karunianya jualah penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Renja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Tahun 2018 ini disusun sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan pada penyusunan dokumen ini, dan kami mengharapkan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh segenap jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga memberikan manfaat bagi peningkatan investasi yang pada akhirnya sebagai pengantar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Banjarbaru, Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Ir. H. Nafarin, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19620513 198903 1 011

Daftar isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1.
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	2
 BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	
BKPMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	4
2.1 Tugas Pokok	4
2.2 Fungsi.....	4
2.3 Struktur Organisasi.....	5
2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan.....	7
 BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN	
BERJALAN.....	10
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	14
 BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	27
4.1 Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan	27
4.2 Tujuan dan Sasaran	29
4.3 Program dan Kegiatan	32
 BAB V PENUTUP	33

Daftar Tabel

Tabel 1 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II)	1
Tabel 2 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON III)	4
Tabel 3.1 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON III)	6
Tabel 3.2 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON III)	7
Tabel 3.3 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON III)	8
Tabel 3.4 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON III)	9
Tabel 3.5 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON III)	10
Tabel 3.6 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON III)	11
Tabel 4.1 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	12
Tabel 4.2 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	13
Tabel 4.3 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	14
Tabel 4.4 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	15
Tabel 4.5 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	16
Tabel 4.6 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	17
Tabel 4.7 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	18
Tabel 4.8 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	19
Tabel 4.9 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	20
Tabel 4.10 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	21
Tabel 4.11 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	22
Tabel 4.12 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	23
Tabel 4.13 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	24
Tabel 4.14 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	25
Tabel 4.15 (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV)	26

Daftar Gambar

Gambar 1 (POHON PENINGKATAN INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN)

Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi..... 1

Gambar 2 (POHON PENINGKATAN INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN)

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik 2

Gambar 3 (POHON PENINGKATAN INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN)

Peningkatan Nilai LAKIP 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 072 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalsel ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- g. Kepmen No 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kalimantan Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (renja) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal untuk tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan tersusun menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

BAB II. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Memuat uraian tugas dan fungsi, serta struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

Menjabarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun lalu / terakhir.

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Menjelaskan tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan dan pelaksanaan urusan penanaman modal, serta uraian program dan

kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V. PENUTUP

BAB II
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

2.1. Tugas Pokok

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.2. Fungsi

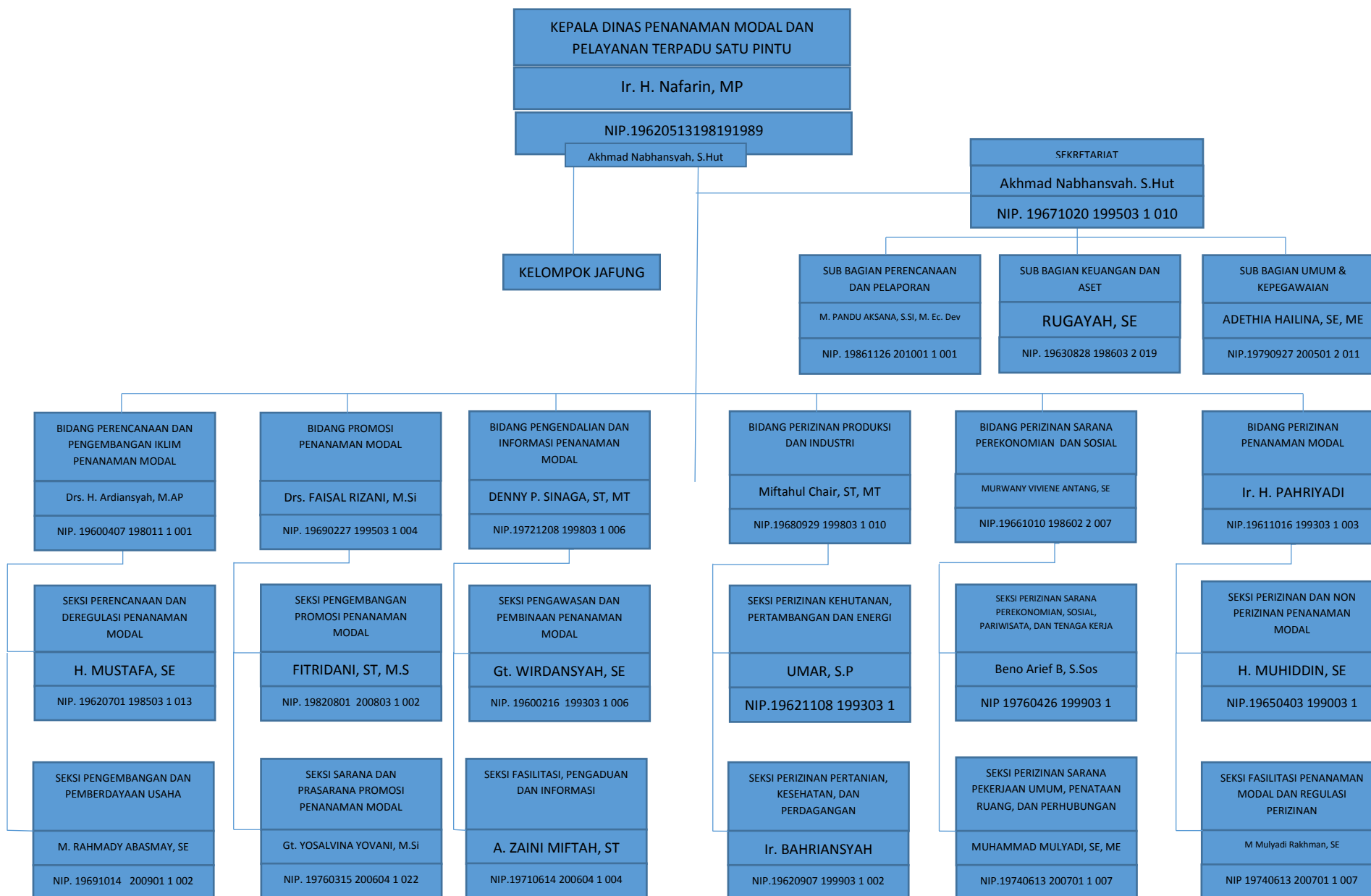
Adapun fungsi Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal
- d. Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- e. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri
- f. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial
- g. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal
- h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

2.3. Struktur Organisasi

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktural jabatan yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian :
 - i. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - ii. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - iii. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- c. Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Sarana Promosi Penanaman Modal
- d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim penanaman terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Fasilitas, Pengaduan, dan Informasi
- f. Bidang Perizinan Produksi dan Industri terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi
 - ii. Sub Bidang Perizinan Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan
- g. Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Perizinan Sarana Perekonomian, Sosia, Pariwisata, dan Tenaga Kerja
 - ii. Sub Bidang Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
- h. Bidang Perizinan Penanaman Modal terdiri dari 2 sub bidang
 - i. Sub Bidang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Perizinan Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan



2.4 KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Dibawah ini disampaikan daftar barang dan inventaris Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sarana Dan Prasarana Yang Ada per 31 Desember 2016

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi	Ket.
1	Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1 Hibah dari BKPM, 1 dari Biro Perlengkapan
2	Mini Bus (15 Org kebawah)	5	Baik	
3	Sepeda Motor	7	Baik	
4	Mesin Tik	3	2 Baik, 1 Rusak	
5	Almari Besi	9	4 kurang baik, 5 baik	
6	Filling Besi	46	baik	39 dari Biro Perlengkapan
7	Brangkas	2	1 rusak berat, 1 baik	
8	Lemari Kaca	1	baik	
9	Alat Penyimpan Lainnya	1	Baik	dari Biro Perlengkapan
10	Mesin Absensi	2	Baik	dari Biro Perlengkapan
11	Alat Kantor Lainnya	2	Baik	dari Biro Perlengkapan (infokus)
12	Alat Kantor Lainnya	2	Baik	dari Biro Perlengkapan (partisi)
13	Alat Kantor Lainnya	1	Baik	dari Biro Perlengkapan (walpaper)
14	Lemari Kayu	9	5 baik, 4 kurang baik	dari Biro perlengkapan
15	Meja Rapat	17	Baik	
16	Meja Receptionis	1	Baik	
17	Meja Tambahan	1	Baik	dari Biro Perlengkapan
18	Kursi Rapat	50	Baik	dari Biro Perlengkapan
19	Tikar	1	Baik	3 dari Biro Perlengkapan
20	Sofa	5	Baik	
21	kaca Bening	3	Baik	
22	Karpet	5	Baik	dari Biro Perlengkapan
23	Jam Mekanis	13	7 baik, 6 rusak berat	
24	Lemari Es	2	Baik	
25	AC Split	10	8 baik, 2 rusak berat	1 Paket dari Biro Perlengkapan
26	Kipas Angin	6	Baik	
27	Televisi	2	Baik	
28	Sound System	1	Baik	1 Paket dari Biro Perlengkapan
29	Dispencer	1	Baik	

30	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	kurang baik	infokus
31	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	kurang baik	genzet
32	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	kurang baik	mesin pompa
33	Alat Rumah Tangga Lainnya	5	kurang baik	ups
34	Alat Rumah Tangga Lainnya	5	kurang baik	tahun 2010 (targa)
35	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik	karpets
36	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik	granit dari Biro Perlengkapan
37	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik	credenza dari Biro Perlengkapan
38	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik	backdroft dari Biro Perlengkapan
39	Komputer lainnya/Jaringan Lainnya	1	Baik	server
40	P.C unit	40	35 baik, 5 rusakberat	11 dari Biro Perlengkapan
41	Laptop	6	Baik	
42	Notebook	30	19 baik, 11 kurang baik	
43	Personal Komputer Lainnya	11	Baik	apple dan samsung
44	Hardisk	1	Baik	
45	Printer	31	25 baik , 6 rusak berat	5 dari Biro Perlengkapan
46	Personal Komputer Lainnya	25	Baik	flasdisk dan tinta botol
47	Meja kerja Pejabat Eselon II	2	Baik	1 dari Biro Perlengkapan
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik	dari Biro Perlengkapan
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	14 baik, 1 rusak berat	9 dari Biro Perlengkapan
50	Meja Kerja Non Struktural	39	Baik	35 dari Biro Perlengkapan
51	Meja Rapat Pejabat	11	Baik	dari Biro Perlengkapan
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	1 baik, 1 rusak berat	1 dari Biro Perlengkapan
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	Baik	13 dari Biro Perlengkapan
54	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	78	Baik	dari Biro Perlengkapan
55	Kursi Tamu Diruang Pejabat Eselon	2	Baik	
56	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	47	Baik	dari Biro Perlengkapan
57	Kamera	2	Baik	
58	Peralatan Studio Visual	70	67 baik, 3 rusak berat	6 kamera, 2 Televisi, 58 dari Biro Perlengkapan
59	Mesin generator	1		
60	Mesin pompa air	1		
61	Micro bus	2	Baik	1 dari Biro Perlengkapan
62	Alat Pemeliharaan Tanaman	1	Baik	

	Lainnya			
63	Mesin fotocopy	1	Baik	
64	Horden	1	Baik	
65	Alat dapur lainnya	2	Baik	
	Peralatan personal komputer			
66	lainnya	1	Baik	
67	Telephone (Pabx)	1	Baik	

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu sampai dengan Bulan Agustus Tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 42.15 %

Kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi kinerja keuangan 15.27 % & Fisik sebesar 66.67 %
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi kinerja keuangan 31.86% & Fisik sebesar 66.67%
- Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan realisasi kinerja keuangan 63.91% & Fisik sebesar 66.67%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan realisasi kinerja keuangan 40.43% & Fisik sebesar 66.67%
- Penyediaan alat tulis kantor dengan realisasi kinerja keuangan 67.40% & Fisik sebesar 70.00 %
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi kinerja keuangan 46.78% & Fisik sebesar 50.00%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi kinerja keuangan 88.78% & Fisik sebesar 90.00 %

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi kinerja keuangan 30.94% & Fisik sebesar 66.67%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi kinerja keuangan 29.90% & Fisik sebesar 66.67%
- Penyediaan makan dan minuman dengan realisasi kinerja keuangan 42.94 % & Fisik sebesar 66.67 %
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan realisasi kinerja keuangan 43.51 % & Fisik sebesar 66.67 %
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan realisasi kinerja keuangan 47.25 % & Fisik sebesar 66.67 %
- Penataan Perpustakaan realisasi kinerja keuangan 32.67% & Fisik sebesar 66.67 %
- Penyediaan Jasa Teknis Perizinan realisasi kinerja keuangan 49.68 % & Fisik sebesar 52.00 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi kinerja keuangan 23.44 %

Kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan realisasi kinerja keuangan 0,00% & Fisik sebesar 5.00 %
- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan realisasi kinerja keuangan 0.00% & Fisik sebesar 5.00 %
- Pengadaan komputer dengan realisasi kinerja keuangan 0,00% & Fisik sebesar 5.00 %
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi kinerja keuangan 31.52% & Fisik sebesar 33.00 %
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi kinerja keuangan 72.03% & Fisik sebesar 75.00 %
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan realisasi kinerja keuangan 39.73% & Fisik sebesar 48.00 %

- Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor realisasi kinerja keuangan 0.00% & Fisik sebesar 10.00 %
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi kinerja keuangan 47.06 %
- Kegiatan :
- Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dengan realisasi kinerja keuangan 47.06 % & Fisik sebesar 50.00 %
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian, Kinerja dan Keuangan dengan realisasi kinerja keuangan 58.78%
- Kegiatan :
- Penyusunan pelaporan triwulan dan pelaporan keuangan akhir tahun dengan realisasi kinerja keuangan 20.60% & Fisik sebesar 20.00 %
 - Penatalaksanaan perencanaan program penanaman modal dengan realisasi kinerja keuangan 66.74 % & Fisik sebesar 80.00 %
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, realisasi pelaksanaan 48.57 % dengan kegiatan:
- Pengembangan dan Pemberdayaan usaha, dengan realisasi kinerja keuangan 66.97% & Fisik sebesar 70.00 %
 - Penyelenggaraan pameran investasi, dengan realisasi kinerja keuangan 47.00 % & Fisik sebesar 50.00 %
 - Penyusunan dokumen (buku) peluang dan potensi investasi daerah, dengan realisasi kinerja keuangan 30.66 % & Fisik sebesar 33.00 %
 - Pelayanan penanaman modal, dengan realisasi kinerja keuangan 44.49% & Fisik sebesar 45.00 %

- Pelaksanaan sistem informasi perizinan penanaman modal, dengan realisasi kinerja keuangan 46.79 % & Fisik sebesar 50.00 %
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, realisasi pelaksanaan 39.61 % dengan kegiatan:
- Perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat, dengan realisasi kinerja keuangan 70.56% & Fisik sebesar 80.00 %
 - Pengawasan dan pelaksanaan task force dalam rangka penyelesaian permasalahan investasi, dengan realisasi kinerja keuangan 35.34 % & Fisik sebesar 37.00 %
 - Monitoring evaluasi perkembangan dan permasalahan investasi, dengan realisasi kinerja keuangan 20.42 % & Fisik sebesar 30.00 %
7. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik, realisasi pelaksanaan 14.33% dengan kegiatan:
- Penyusunan standar pelayanan SMM ISO 9001:2008, dengan realisasi kinerja keuangan 12.23% & Fisik sebesar 15.00 %
 - Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dengan realisasi kinerja keuangan 43.87% & Fisik sebesar 45.00 %
8. Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan, realisasi pelaksanaan 40.22 % dengan kegiatan:
- Sosialisasi perizinan perekonomian dan sosial se Kalsel dengan realisasi kinerja keuangan 91.10 % & Fisik sebesar 90.00 %
 - Sosialisasi perizinan produksi dan industri dengan realisasi kinerja keuangan 47.02% & Fisik sebesar 50.00 %
 - Rapat koordinasi perizinan perekonomian dan sosial dengan instansi terkait dan kab/kota se Kalsel dengan realisasi kinerja keuangan 29.52 % & Fisik sebesar 32.00 %
 - Peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian produksi dan industri dengan realisasi kinerja keuangan 16.70 % & Fisik sebesar 20.00 %

- Rapat koordinasi perizinan produksi dan industri dengan instansi terkait dan kab/kota se kalsel dengan realisasi kinerja keuangan 76.76 % & Fisik sebesar 80.00 %
- Aplikasi dan sistem informasi pengelolaan perizinan secara online dengan realisasi kinerja keuangan 38.40 % & Fisik sebesar 40.00 %
- Peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian ijin bidang perizinan sarana perekonomian dan sosial dengan realisasi kinerja keuangan 39.87 % & Fisik sebesar 40.00 %

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- **Badan Koordinasi Penanaman Modal**

PENGUKURAN KINERJA SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : BKPMD Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan			Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				<u>76,19%</u>			<u>87,91%</u>
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	Pemenuhan kebutuhan perangko, material dan pengiriman barang cetakan dalam dan luar negeri	Rp. 7.000.000	Rp. 2.185.000	31,21%	12 bulan	12 bulan	50,00%
	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelunasan pembayaran listrik, telpon, dan air	Rp. 500.000.000	Rp. 252.810.550	50,56%	12 bulan	12 bulan	85,00%
	3) Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan	Rp. 134.800.000	Rp. 125.350.000	92,99%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	4) Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan peralatan kebersihan kantor	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	100,00%	1 paket	1 paket	100,00%
	5) Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	Rp. 37.000.000	Rp. 37.000.000	100,00%	1 paket	1 paket	100,00%
	6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 35.000.000	Rp. 5.698.000	16,28%	1 paket	1 paket	50,00%
	7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemenuhan kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik yang dibutuhkan	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase ketersediaan koran, majalah, buku perundang-undangan	Rp. 69.440.000	Rp. 69.180.000	99,63%	100%	100%	100,00%
	9) Penyediaan Bahan	Tersedianya sarana dan	Rp. 177.000.000	Rp. 135.677.750	76,65%	12 bulan	12 bulan	90,00%

	Logistik Kantor	prasarana aparatur						
	10) Penyediaan makan dan minum	Jumlah penyediaan pelayanan makan minum rapat dan tamu	Rp. 190.000.000	Rp. 136.950.000	72,08%	makan minum harian 60 orang, makan minum rapat 12 bulan, makan minum tamu 12 bulan	makan minum harian 60 orang, makan minum rapat 12 bulan, makan minum tamu 12 bulan	90,00%
	11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah yang dihadiri	Rp. 1.211.980.000	Rp. 911.683.450	75,22%	1 paket	1 paket	90,00%
	12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah yang dihadiri	Rp. 230.000.000	Rp. 229.394.000	99,74%	1 paket	1 paket	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp. 2.630.220.000	Rp. 1.943.928.750				100%
Meningkatnya daya guna dan terpenuhinya keperluan inventaris gedung dan kantor	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				<u>57,37%</u>			<u>75,00%</u>
	13) Pengadaan komputer	jumlah komputer	Rp. 122.000.000	–	0,00%	1 paket	1 paket	0,00%
	14) Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	Rp. 211.500.000	Rp. 110.989.000	52,48%	1 paket	1 paket	75,00%
	15) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	Rp. 64.424.000	Rp. 61.750.000	95,85%	1 paket	1 paket	100,00%
	16) Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah kendaraan dinas yang masuk	Rp. 166.140.000	Rp. 124.511.700	74,94%	12 bulan	12 bulan	95,00%

	kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan						
	17) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara	Rp. 31.000.000	Rp. 13.925.000	44,92%	12 bulan	12 bulan	75,00%
	18) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Rp. 106.500.000	Rp. 37.058.500	34,80%			80,00%
	19) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor yang masuk pemeliharaan	Rp. 251.440.000	Rp. 247.931.000	98,60%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp. 953.004.000	Rp. 596.165.200				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				94,08%			97,50%
	20) Kursus, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 224.970.000	Rp. 200.490.800	89,12%	12 bulan	12 bulan	95,00%
	21) Pengembangan wawasan SDM BKPM provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya pengembangan wawasan terkait dengan pengembangan, pelayanan, potensi investasi penanaman modal	Rp. 137.000.000	Rp. 135.687.900	99,04%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp. 361.970.000	Rp. 336.178.700				
Meningkatnya kinerja akuntabilitas BKPM Prov.Kal.Sel.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				86,11%			95%

	22) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 15.000.000	Rp. 12.917.000	86,11%	1 Laporan	1 Laporan	95,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp. 15.000.000	Rp. 12.917.000				
Meningkatnya Minat Investor Berinvestasi dan Iklim Investasi di Kalimantan Selatan.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				<u>84,13%</u>			<u>94%</u>
	23) Penyusunan Dokumen (buku) peluang dan potensi investasi daerah	Dokumen peluang dan potensi investasi daerah	Rp. 235.000.000	Rp. 149.508.000	63,62%	1 dokumen	1 dokumen	90,00%
	24) Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran/expo yang diikuti	Rp. 1.068.440.000	Rp. 798.272.845	74,71%	100 % /9 kali	100 % /9 kali	90,00%
	25) Kerjasama bidang penanaman modal	Terjalinnnya koordinasi bidang penanaman modal	Rp. 167.800.000	Rp. 163.096.900	97,20%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
	26) Pembinaan pelayanan penanaman modal	Terlaksana sosialisasi terkait kebijakan Penanaman Modal, Terlaksana Pembinaan Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 182.300.000	Rp. 179.470.500	98,45%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
	27) Inventarisasi data sistem informasi potensi investasi daerah (SIPIID)	Terlaksananya pelatihan SIPIID kepada kab/kota se kalsel, Terlaksananya updating data SIPIID dan tersedianya data dan informasi potensi investasi di Kalsel	Rp. 215.000.000	Rp. 186.400.100	86,70%	1 dokumen	1 dokumen	90,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp. 1.868.540.000	Rp. 1.476.748.345				
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan				<u>91,34%</u>			<u>97%</u>

	<i>Realisasi Investasi</i>							
	28) Pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Frekuensi koordinasi kerjasama dibidang investasi	Rp. 360.496.000	Rp. 322.059.350	89,34%	83 BAP	83 BAP	95,00%
	29) Monitoring dan evaluasi investasi daerah	Jumlah Monitoring, evaluasi kegiatan dan pelaporan	Rp. 195.000.000	Rp. 157.254.400	80,64%	1 Dokumen	1 Dokumen	90,00%
	30) Penatalaksanaan Perencanaan dan Program	Jumlah Penatalkasanaan perencanaan dan program	Rp. 80.720.000	Rp. 73.069.000	90,52%	100 % / 7 dokumen	100 % / 7 dokumen	100,00%
	31) Penyusunan Dokumen RUPM	Dokumen RUPM	Rp. 474.440.000	Rp. 462.158.200	97,41%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
	31) Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal tingkat Provinsi dan Pusat	Terlaksananya RKPPMD, KP3MN, dan sinkronisasi program terkait pengembangan penanaman modal	Rp. 198.000.000	Rp. 195.643.650	98,81%	100 % / 2 kali	100 % / 2 kali	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp. 1.308.656.000	Rp. 1.210.184.600				
Rata- rata capaian kinerja keseluruhan			Rp. 7.137.390.000	Rp. 5.576.122.595	78,13%			

• **Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No.	Program /No.DPA/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Dana	Bobot	Input (%)		Output (%)			Sisa Pagu
		Output	Satuan Unit	Outcome	Satuan Unit			S	R	S	R	R Unit	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2,332,900,400.00	58.24	100.00	89.70	100.00	99.48		240,356,132.00
	• Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	690,455,400.00	17.24	100.00	97.93	100.00	100.00	12 bulan	14,299,578.00
	• Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan dan Minuman bagi PNS	12 bulan	Meningkatnya daya tahan tubuh dan produktifitas karyawan	80 %	108,560,000.00	2.71	100.00	82.28	100.00	100.00	12 bulan	19,232,500.00
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan bakar	12 bulan	Lancarnya operasional kantor BPTSP	80 %	122,000,000.00	3.05	100.00	62.10	100.00	90.00	12 bulan	46,236,316.00
	• Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya sarana listrik dan elektronik	12 bulan	Lampu penerangan dan aliran listrik berfungsi dengan baik	80 %	20,000,000.00	0.50	100.00	99.60	100.00	100.00	12 bulan	80,100.00
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	80 %	80,000,000.00	2.00	100.00	99.93	100.00	100.00	12 bulan	52,900.00
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	Kegiatan administrasi kantor terlaksana dengan baik dan lancar	80 %	100,000,000.00	2.50	100.00	99.92	100.00	100.00	12 bulan	76,800.00
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bermacam bahan bacaan	12 bulan	Pengetahuan aparatur	80 %	7,000,000.00	0.17	100.00	85.71	100.00	100.00	12 bulan	1,000,000.00
	• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Biaya Pengeluaran Administrasi Keuangan SKPD	12 bulan	Terlaksananya kegiatan jasa administrasi keuangan	80 %	77,000,000.00	1.92	100.00	99.89	100.00	100.00	12 bulan	87,500.00

	• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan ruangan kantor dan lingkungan	12 bulan	Terpeliharanya kebersihan kantor	80 %	99,440,000.00	2.48	100.00	99.06	100.00	100.00	12 bulan	929,835.00
	• Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, air dan listrik	12 bulan	Lancarnya Sarana Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	80 %	382,475,000.00	9.55	100.00	59.86	100.00	100.00	12 bulan	153,519,068.00
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman Surat Menyurat/Kedinasan	12 bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 %	9,000,000.00	0.22	100.00	100.00	100.00	100.00	12 bulan	0.00
	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Kebutuhan koordinasi dan konsultasi organisasi lancar	80 %	360,000,000.00	8.99	100.00	99.96	100.00	100.00	12 bulan	154,300.00
	• Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Tersedianya jasa teknis perizinan	12 bulan	Lancarnya adm. perizinan dan non perizinan	80 %	276,970,000.00	6.91	100.00	98.31	100.00	100.00	12 bulan	4,687,235.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,358,764,600.00	33.92	100.00	91.46	100.00	99.72		115,979,604.00
	• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	102 unit	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	767,339,600.00	19.16	100.00	97.08	100.00	100.00	102 unit	22,393,100.00
	• Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer dan peralatannya	46 unit	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %	243,125,000.00	6.07	100.00	91.23	100.00	100.00	46 unit	21,325,086.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	Gedung kantor terpelihara dengan baik	80 %	134,440,000.00	3.36	100.00	82.21	100.00	100.00	12 bulan	23,913,785.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	Kendaraan dinas dan operasional terpelihara dengan baik	80 %	121,360,000.00	3.03	100.00	78.55	100.00	100.00	12 bulan	26,032,033.00

	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	Perlengkapan gedung kantor terawat dengan baik	80 %	15,000,000.00	0.37	100.00	21.42	100.00	75.00	12 bulan	11,786,500.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	peralatan gedung kantor terawat dengan baik	80 %	77,500,000.00	1.93	100.00	86.41	100.00	100.00	12 bulan	10,529,100.00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					140,000,000.00	3.50	100.00	78.50	100.00	100.00		30,100,000.00
	• Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	12 bulan	Bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan karyawan	80 %	140,000,000.00	3.50	100.00	78.50	100.00	100.00	12 bulan	30,100,000.00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					63,947,900.00	1.60	100.00	97.17	100.00	100.00		1,809,600.00
	• Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya pelaporan dan perencanaan sesuai prosedur	5 Dokumen	Tersedianya arsip pelaporan dan perencanaan	100 %	53,397,900.00	1.33	100.00	99.12	100.00	100.00	5 Dokumen	469,900.00
	• Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya pembuatan Neraca, CALK, Arus kas dan LRA	12 bulan	Tertibnya Administrasi pelaporan Keuangan SKPD	80 %	7,050,000.00	0.18	100.00	85.99	100.00	100.00	12 bulan	987,500.00
	• Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya pembuatan laporan semesteran	12 bulan	Tertibnya administrasi keuangan SKPD	80 %	3,500,000.00	0.09	100.00	89.94	100.00	100.00	12 bulan	352,200.00
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik					100,000,000.00	2.50	100.00	67.38	100.00	85.00		32,617,500.00
	• Pengembangan Promosi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya promosi dan kelengkapan perizinan	12 bulan	Kesadaran investor mengurus izin	80 %	100,000,000.00	2.50	100.00	67.38	100.00	85.00	12 bulan	32,617,500.00
6	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum					10,000,000.00	0.25	100.00	94.68	100.00	100.00		531,800.00

	• Penyusunan IKM	Melaksanakan survey kepuasan pemohon perizinan	1 kegiatan	Tercapainya hasil indeks kepuasan masyarakat	100 %	10,000,000.00	0.25	100.00	94.68	100.00	100.00	1 kegiatan	531,800.00
Total						4,005,612,900.00	100	100.00	89.48	100.00	99.23		421,394,636.00

Melihat kepada peluang dan kendala dalam mewujudkan dan mendorong pengembangan usaha investasi serta peningkatan informasi penanaman modal dalam rangka peningkatan minat investasi di Kalimantan selatan melalui pengembangan sektor unggulan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Perencanaan yang matang
- b. Pelaksanaan kegiatan promosi yang dapat memberikan informasi, dibutuhkan para calon investor
- c. Terciptanya hubungan baik dan saling menguntungkan antara investor dan Pemerintah daerah
- d. Peningkatan sarana dan prasarana
- e. Meningkatkan SDM baik ditingkat provinsi maupun Kab/Kota
- f. Meningkatkan mutu layanan
- g. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian

Untuk Mewujudkan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan program sebagai berikut :

- a. Pelayanan Administrasi perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- f. Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi
- g. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik
- h. Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan

Berdasarkan kebijakan dan program tersebut diatas, maka Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun rencana kerja sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sumber daya manusia (SDM)
- b. Melaksanakan pengumpulan data, penyusunan program dan rencana kerja serta koordinasi penanaman modal didaerah
- c. Melaksanakan kegiatan informasi Penanaman modal bagi kalangan dunia usaha
- d. Pelaksanakan kegiatan pembinaan kerjasama investasi dan kemitraan usaha potensial
- e. Melaksanakan koordinasi kegiatan, identifikasi potensi, penyusunan profil investasi, komoditi unggulan serta pelaksanaan promosi potensi daerah.
- f. Melaksanakan pengajian pengembangan investasi dan penilaian atas realisasi pelaksanaan penanaman modal didaerah
- g. Pembinaan mengenai persetujuan, perijinan dan fasilitas penanaman modal
- h. Melaksanakan pengendalian penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN
- i. Mengadakan rapat dengan perusahaan PMA/PMDN
- j. Orientasi lapangan dalam rangka perpanjangan waktu penyelesaian proyek PMA/PMDN
- k. Pembinaan dan bantuan konsultasi teknis secara langsung bagi PMA/PMDN baik dalam perencanaan proyek maupun operasional
- l. Konsultasi dalam rangka Rakor teknis tentang pemberian perijinan dan fasilitas PMA/PMDN
- m. Mengikuti Rakornis penanaman modal, pembahasan perijinan dan fasilitas PMA/PMDN tingkat regional
- n. Mengadakan Rakor Teknis pemberian perijinan tingkat prov/Kab/Kota
- o. Evaluasi dan identifikasi perusahaan kategori macet
- p. Penilaian secara langsung kepada perusahaan yang berprestasi untuk meningkatkan minat dan kegairahan berinvestasi melalui keteladanan.

Beberapa kajian atau dokumen penunjang yang menjadi dasar perencanaan Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu dibidang penanaman modal
- b. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal
- c. Peraturan Kepala BKPM nomor 13 Tahun 2009 tentang pengendalian tata cara permohonan penanaman modal
- d. Peraturan Kepala BKPM no 14 Tahun 2009 tentang sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

4.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's. **Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021** adalah :

**“ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing ”**

- Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 :

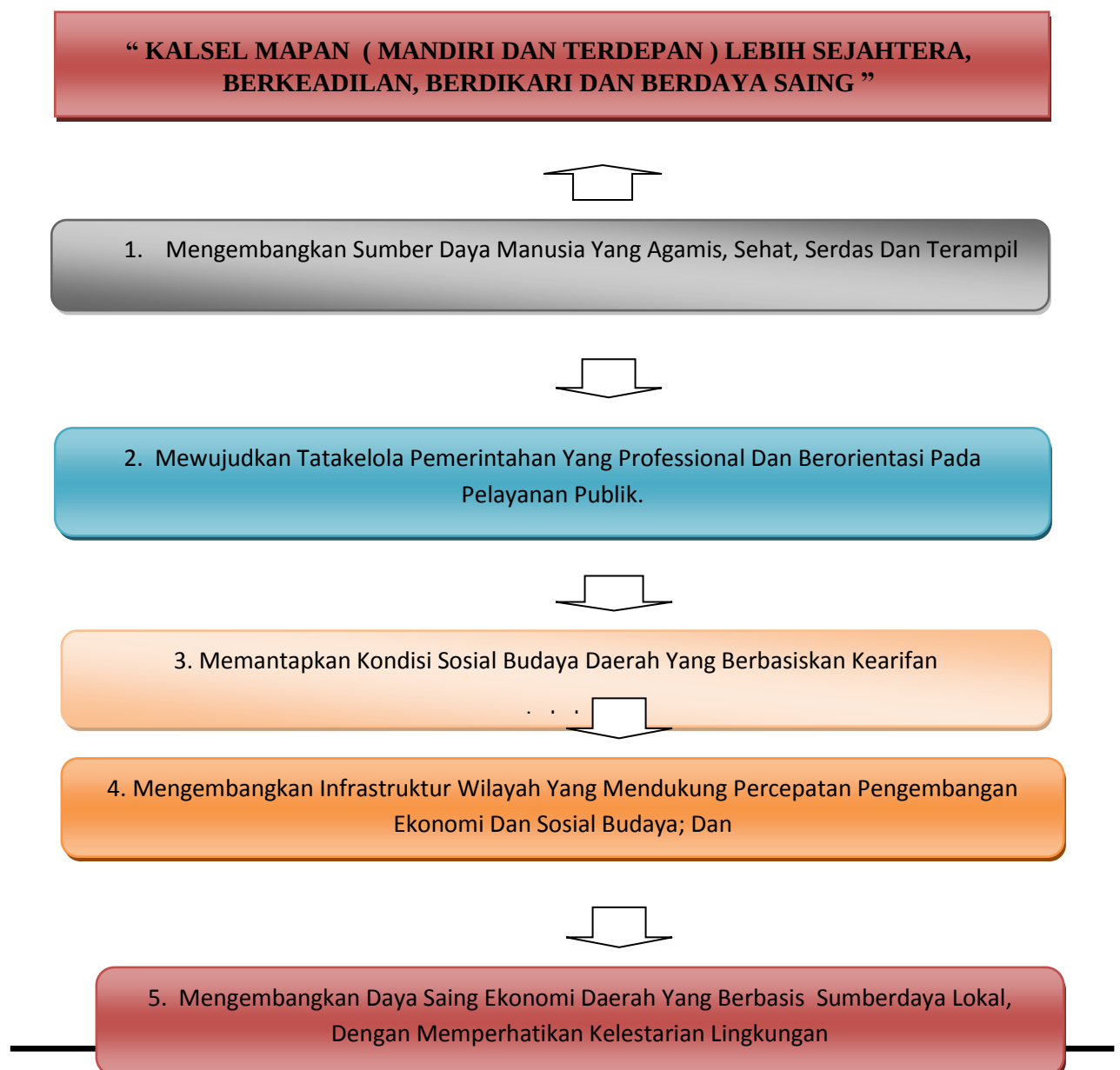
1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;

3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal;
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya; Dan
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan;

Untuk lebih jelasnya bahwa untuk menjamin terwujudnya Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, dibutuhkan 5 (lima) misi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1

Hubungan Visi dan Misi



4.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka perlu dipertimbangkan adanya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Perizinan selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

1. Tujuan

Adapun Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2020 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada **Misi 5**

Misi 5
Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Tujuan
Meningkatkan daya saing Perekonomian

Sasaran

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa

Indikator

- **Persentasi Peningkatan Jumlah Perizinan dan Nonperizinan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki indikator kinerja yang berujung pada realisasi investasi di daerah setiap tahunnya. Adapun keterkaitan antara sasaran utama dan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	8,1 Trilyun Rupiah
		Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	15%
2.	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	"B"
3.	Peningkatan Nilai LAKIP	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	("BB")

4.3. Program dan Kegiatan

Tema pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2018 yakni : " Memacu Investasi melalui Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan Berdaya Saing menuju Kalsel Mapan." Dengan 13 Prioritas pembangunan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung prioritas ke-12 yakni Kalsel menuju daerah industri, perdagangan, dan jasa.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pembangunan pada urusan wajib penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan 2 (dua) program prioritas urusan penanaman modal yang didukung dengan program kesekretariatan. Dalam pelaksanaannya, Dinas PM dan PTSP mempunyai kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Pelayanan Penanaman Modal
2. Pengembangan dan pemberdayaan usaha

3. Penyelenggaraan Pameran Investasi
4. Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah
5. Pengelolaan sistem informasi perizinan dan penanaman modal
6. Perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat
7. Forum Investasi Kawasan Industri Kalimantan Selatan
8. Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force dalam rangka Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi
9. Evaluasi RUPM
10. Sosialisasi perizinan
11. Rapat Koordinasi teknis bidang perizinan
12. Peninjauan lapangan untuk syarat penerbitan izin
13. Program Kegiatan Kesekretariatan

Adapun usulan dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 terlampir sesuai dengan yang termuat pada aplikasi *e-planning* yang sejalan dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018.

BAB V

PENUTUP

Perjanjian dan kesepakatan internasional terkait perdagangan bebas, kini gencar dilakukan, oleh pemerintah tanpa pernah mencoba melihat dampak yang akan ditimbulkan. Indonesia sendiri telah menyepakati area perdagangan bebas, diantaranya : asean free trade Agreement (AFTA), Indonesia – Jepang EPA, Asean – China FTA, Asean – Korea FTA. Sedangkan yang masih dalam tahap perundingan adalah Asean – India FTA, Asean – EU FTA, Asean – Australia – New Zealand FTA. Sementara zona perdagangan bebas antara Indonesia – AS FTA dan Indonesia – EFTA (Swis, Leichestein, Norwegia dan Island), Masih dalam proses Pra-negosiasi dan jooint study group. Salah satu yang menyita banyak perhatian hari ini adalah kesepakatan zona perdagangan bebas antara persekutuan negara-negara asean (termasuk Indonesia), dengan china upaya mengatasi dampak perdagangan bebas terhadap perkembangan investasi memerlukan upaya maksimal dari seluruh sektor terkait dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu kondisi keamanan dalam negeri serta upaya memulihkan kepercayaan para investor terhadap iklim investasi di daerah kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, antara lain diperlukan sumber daya manusia yang handal serta prasarana dansarana yang mendukung harus lebih dahulu dibenahi dan dilengkapi.

Pelimpahan kewenangan penanaman modal ke Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah persiapan yang matang baik menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunaknya memerlukan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan pentahapan-pentahapan yang terencana, baik menyangkut biaya maupun sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Terlaksana rencana kerja ini akan sangat ditentukan partisipasi, kesungguhan dan kerja keras seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan dukungan berbagai pihak, kebijaksanaan pimpinan ditingkat Provinsi serta tersedianya anggaran yang memadai.

Banjarbaru, Mei 2017
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Ir. H. Nafarin, MP

Pembina Tk I

NIP. 19620513 198903 1 011



**Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan SOPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Kode	Urusan, Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0	RUTIN								
0.00.1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kualitas administrasi Perkantoran							
0.00.1.410	Penyediaan Jasa Adminitrasi keuangan	Tersedianya bahan administrasi keuangan	Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan;	198.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan	244.800.000
0.00.1.00	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat tamu	Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan;	430.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan	516.000.000

0.00.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %;	1.233.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	1.479.600.000
0.00.1.414	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %;	120.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	144.000.000
0.00.1.418	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya logistik kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan;	486.600.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan	583.920.000
0.00.1.417	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan;	120.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan	144.000.000
0.00.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %;	448.250.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	537.900.000

0.00.1.411	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan;	246.500.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan	244.800.000
0.00.1.404	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %;	120.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	144.000.000
0.00.1.407	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	lancarnya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan;	841.737.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan	943.200.000
0.00.1.27	Penataan Perpustakaan	Terlaksananya penataan perpustakaan	Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan;	58.856.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan	70.627.200
0.00.1.403	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %;	24.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	28.800.000

0.00.1.416	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	penerangan dan aliran listrik berfungsi dengan baik	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %;	36.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	43.200.000
0.00.1.34	Penyediaan teknis perijinan	Tersedianya jasa teknis perijinan	Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan;	282.840.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan	339.408.000
0.00.3	PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan							
0.00.3.15	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %;	30.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 Dokumen	36.000.000
0.00.3.55	Penatalaksanaan perencanaan dan pelaporan program penanaman modal	Tersedianya dokumen penatalaksanaan perencanaan dan pelaporan kinerja	Provinsi Kalimantan Selatan	7 Dokumen;	120.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 Dokumen	144.000.000

0.00.6	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Aparatur							
0.00.6.10	Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	Terlaksanannya Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %;	300.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	360.000.000
0.00.7	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur							
0.00.7.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	415.284.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	498.340.000
0.00.7.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	250.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	300.000.000
0.00.7.11	Pengadaan komputer	Terlaksanannya pengadaan komputer	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	100.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100 %	322.603.200

0.00.7.150	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan gedung kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	150.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	180.000.000
0.00.7.21	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	330.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	
2,12	PENANAMAN MODAL								
2.12.15	PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN							
2.12.15.17	Perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat	Terlaksananya RKPPMD, KP3MN, sinkronisasi program terkait pengembangan penanaman modal	Provinsi Kalimantan Selatan	100 %;	400.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	100 %	480.000.000
2.12.15.20	Evaluasi RUPM	Dokumen Evaluasi RUPM	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen;	345.750.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	1 %	414.900.000

2.12.15.20	Pengawasan dan pelaksanaan task force dalam rangka fasilitasi penyelesaian masalah	Terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan task force	Provinsi Kalimantan Selatan	86 BAP;	494.870.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	86 %	593.844.000
2.12.15.00	Forum Investasi Kawasan Industri Kalimantan Selatan	Berita Kesepakatan Acara	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Berita Acara	300.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	1 Berita Acara	300.000.000
2.12.15.20	Penyusunan Deregulasi Penanaman Modal	Dokumen Rancangan Deregulasi Penanaman modal	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen ;	255.250.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	1 %	306.300.000
2.12.15.17	Monitoring evaluasi perkembangan dan permasalahan investasi	Terlaksananya monitoring evaluasi	Provinsi Kalimantan Selatan	86 perusahaan;	380.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	86 %	456.000.000
2.12.16	PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase Peningkatan Rencana investasi PMA dan PMDN							

2.12.16.19	Pelayanan penanaman modal	Terlaksananya koordinasi pelayanan penanaman modal	Provinsi Kalimantan Selatan	2 Kali Kab/Kota	510.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	2 %	612.000.000
2.12.16.20	Pengelolaan sistem informasi perijinan dan penanaman modal	Terlaksananya pelatihan aplikasi perijinan dan penanaman modal dan terlaksananya pengelolaan sistem informasi	Provinsi Kalimantan Selatan	2 %;	650.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	2 %	720.000.000
2.12.16.17	Penyelenggaraan Pameran investasi	Terlaksananya pameran investasi	Provinsi Kalimantan Selatan	9 kali;	2350000000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	9 %	2580000000
2.12.16.18	Identifikasi peluang dan potensi investasi daerah	Tersedianya data dan informasi potensi penanaman modal	Provinsi Kalimantan Selatan	2 dokumen	600.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	2 Dokumen	672.000.000
2.12.16.16	Pengembangan dan Pemberdayaan usaha	Terlaksananya koordinasi untuk pengemabangan dan pemberdayaan usaha	Provinsi Kalimantan Selatan	2 calon investor;	450.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	2 %	468.000.000

2.12.17	PENINGKATAN KUALITAS DAN KEMUDAHAN PELAYANAN PERIZINAN	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan							
2.12.17.02	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Melaksanakan survey kepuasan permohonan perijinan	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	24.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	1 %	28.800.000
2.12.18.	Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2008	Dokumen ISO	Provinsi Kalimantan Selatanbn	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	200.000.000
2.12.18.05	Peninjauan Lapangan untuk syarat teknis pemberian ijin produksi dan industri	Terlaksananya pelayanan perijinan dibidang produksi dan industri	Provinsi Kalimantan Selatan	1 dokumen	263.850.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	1 dokumen Dokumen	316.620.000
2.12.18.06	Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel	Terlaksananya pelayanan perijinan dibidang produksi dan industri	Provinsi Kalimantan Selatan	1 dokumen	265.120.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	1 dokumen Dokumen	318.144.000

2.12.18.03	Rapat Koordinasi Perijinan Perekonomian dan sosial dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel	Terlaksananya koordinasi perijinan dengan instansi terkait kab/kota	Provinsi Kalimantan Selatan	1 laporan	345.725.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	1 laporan %	414.870.000
2.12.18.01	Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial se Kalsel	Terlaksananya sosialisasi pelayanan perijinan bidang sarana ekonomi sosial	Provinsi Kalimantan Selatan	5 Kali	170.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	5 Kali %	204.000.000
2.12.18.00	Peninjauan Lapangan untuk syarat teknis bidang perijinan penanaman modal	Terlaksananya pelayanan perijinan dibidang PM	Provinsi Kalimantan Selatan	1 dokumen	127.950.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	1 dokumen %	153.540.000
2.12.18.02	Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	Terlaksananya pelayanan perijinan dibidang produksi dan industri	Provinsi Kalimantan Selatan	2 kali kab/kota	151.625.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	2 kali kab/kota %	181.950.000
2.12.18.10	Peninjauan Lapangan untuk syarat teknis pemberian ijin bidang perijinan sarana perekonomian dan	Terlaksananya peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian ijin	Provinsi Kalimantan Selatan	1 dokumen	112.500.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	1 dokumen %	170.000.000

	sosial								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--